1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

A. Perkembangan Inflasi Daerah dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Sungai Penuh selama Triwulan II Tahun 2026, yang mencakup periode April, Mei dan Juni 2026, secara umum menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, namun terdapat beberapa komoditas pangan yang mengalami peningkatan harga cukup signifikan dan perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan Panel Harga Pangan Enumerator Konsumen Kota Sungai Penuh, pergerakan harga selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan adanya fluktuasi terutama pada kelompok komoditas hortikultura, khususnya bawang merah, cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Sementara beberapa komoditas pangan strategis lainnya seperti beras, minyak goreng dan tepung terigu relatif lebih stabil.

Pada kelompok beras, harga beberapa jenis beras lokal/khusus relatif stabil selama periode April sampai dengan Juni 2026. Beras Ciwilis berada pada kisaran Rp15.000/kg, Beras Solok Putih sekitar Rp15.625/kg, Beras Kusut sekitar Rp16.250/kg dan Beras Pandan Wangi sekitar Rp16.250/kg. Harga Beras SPHP juga relatif stabil, berada pada kisaran Rp13.000–Rp13.100/kg. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komoditas beras secara umum belum memberikan tekanan harga yang berarti selama Triwulan II Tahun 2026.

Harga kedelai biji kering impor juga relatif stabil, yaitu sekitar Rp12.000–Rp13.100/kg. Stabilnya harga kedelai memberikan kondisi yang relatif positif bagi pelaku usaha pangan yang menggunakan kedelai sebagai bahan baku, khususnya industri tahu dan tempe.

Pada kelompok hortikultura, terdapat peningkatan harga yang cukup menonjol. Harga bawang merah yang pada April 2026 berada pada kisaran Rp22.900/kg meningkat menjadi sekitar Rp25.900/kg pada Mei dan mencapai sekitar Rp30.000/kg pada Juni 2026. Dengan demikian, dibandingkan April, harga bawang merah pada Juni meningkat sekitar 31%. Kenaikan tersebut perlu menjadi perhatian karena bawang merah merupakan salah satu komoditas pangan yang mempunyai volatilitas harga cukup tinggi.

Harga cabai merah keriting juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada April 2026 harga rata-rata berada sekitar Rp28.800/kg, meningkat pada Mei dan pada Juni mencapai rata-rata sekitar Rp42.600/kg. Dibandingkan April, harga cabai merah keriting pada Juni meningkat sekitar 48%. Kenaikan tersebut merupakan salah satu perkembangan harga yang paling perlu diantisipasi karena cabai merupakan komoditas volatile food yang sangat sensitif terhadap kondisi produksi, pasokan dan distribusi.

Cabai rawit merah juga menunjukkan fluktuasi selama Triwulan II. Pada April harga berada sekitar Rp31.200/kg, kemudian mengalami peningkatan pada Mei dan pada Juni berada pada kisaran Rp35.000/kg. Meskipun peningkatannya tidak setinggi cabai merah keriting, komoditas ini tetap perlu dipantau karena pergerakan harga cabai umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan produksi daerah sentra.

Pada kelompok bawang putih, harga relatif lebih terkendali. Harga pada April sekitar Rp38.000/kg dan selanjutnya mengalami penurunan hingga berada pada kisaran Rp36.000/kg pada Juni. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bawang putih tidak menjadi sumber tekanan harga utama selama Triwulan II Tahun 2026.

B. Perkembangan Harga Komoditas Peternakan dan Perikanan

Pada kelompok komoditas peternakan, harga daging sapi menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode Triwulan II. Harga rata-rata pada April berada sekitar Rp139.000–Rp140.000/kg dan meningkat hingga sekitar Rp151.000/kg pada Juni. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya tekanan harga pada komoditas daging sapi yang perlu dipantau, khususnya menjelang dan setelah periode hari besar keagamaan serta pada saat permintaan masyarakat meningkat.

Harga daging ayam ras cenderung mengalami penurunan dibandingkan April. Pada April harga rata-rata sekitar Rp43.200/kg, sedangkan pada Juni berada sekitar Rp40.000/kg. Penurunan harga ayam ras menunjukkan bahwa pasokan komoditas tersebut relatif tersedia dan belum memberikan tekanan inflasi yang berarti.

Harga telur ayam ras juga menunjukkan kecenderungan menurun. Harga rata-rata pada April berada sekitar Rp27.000/kg dan pada Juni turun menjadi sekitar Rp24.000/kg. Penurunan harga telur ayam ras menjadi faktor yang membantu menjaga stabilitas harga kelompok pangan selama Triwulan II.

Pada kelompok perikanan, harga ikan tongkol mengalami peningkatan. Harga pada April berada sekitar Rp35.000/kg dan meningkat menjadi sekitar Rp39.800/kg pada Juni atau mengalami peningkatan sekitar 14%. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena Kota Sungai Penuh merupakan wilayah yang sebagian kebutuhan ikan konsumsi dipasok dari daerah lain, sehingga perubahan biaya transportasi dan pasokan dari daerah asal dapat mempengaruhi harga di tingkat konsumen.

C. Perkembangan Harga Gula, Minyak Goreng dan Tepung

Harga gula pasir konsumsi mengalami peningkatan dari sekitar Rp18.400/kg pada April menjadi sekitar Rp19.000/kg pada Juni. Kenaikan tersebut relatif terbatas, namun tetap perlu dipantau mengingat gula pasir merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Harga minyak goreng kemasan sederhana relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari sekitar Rp20.700/liter pada April menjadi sekitar Rp21.000/liter pada Juni. Sementara itu, minyak goreng curah meningkat dari sekitar Rp19.000/liter menjadi sekitar Rp20.000/liter pada Juni.

Harga tepung terigu curah relatif stabil pada kisaran Rp9.000/kg, sedangkan tepung terigu kemasan berada pada kisaran Rp13.000/kg. Stabilnya harga komoditas tersebut menunjukkan bahwa kelompok bahan pangan olahan dan bahan baku pangan belum memberikan tekanan harga yang berarti selama Triwulan II Tahun 2026.

D. Komoditas yang Mengalami Kenaikan dan Penurunan Harga

Secara umum, komoditas yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga dari April menuju

Juni 2026 antara lain:

1. Bawang merah, meningkat sekitar 31%;
2. Cabai merah keriting, meningkat sekitar 48%;
3. Cabai rawit merah, meningkat sekitar 12%;
4. Daging sapi, meningkat sekitar 8%;
5. Ikan tongkol, meningkat sekitar 14%;
6. Gula pasir, meningkat sekitar 4%;
7. Minyak goreng kemasan sederhana, meningkat sekitar 1–2%;
8. Minyak goreng curah, meningkat sekitar 5%.

Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain:

1. Bawang putih;
2. Daging ayam ras;
3. Telur ayam ras;
4. Beras SPHP;
5. Beberapa jenis beras lainnya relatif stabil.

Dengan demikian, tekanan harga pada Triwulan II Tahun 2026 lebih banyak berasal dari kelompok **volatile food**, khususnya komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah.

E. Analisis Perkembangan Harga Triwulan II Tahun 2026

Pergerakan harga selama April–Juni 2026 menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan Kota Sungai Penuh masih sangat dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan kelancaran distribusi. Komoditas cabai dan bawang merah memperlihatkan fluktuasi yang cukup tinggi dibandingkan kelompok pangan lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik geografis Kota Sungai Penuh sebagai daerah yang membutuhkan pasokan dari wilayah lain menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi. Gangguan produksi di daerah sentra, keterbatasan pasokan, kenaikan biaya transportasi, kondisi cuaca, serta peningkatan permintaan dapat dengan cepat diteruskan menjadi kenaikan harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, stabilnya harga beras, kedelai, tepung terigu dan minyak goreng serta penurunan harga ayam dan telur menunjukkan bahwa pasokan beberapa komoditas pangan relatif memadai. Kondisi ini menjadi faktor penahan tekanan inflasi daerah.

F. Risiko Inflasi ke Depan

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi Pemerintah Kota Sungai Penuh pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

1. Risiko kenaikan harga cabai dan bawang merah

Kenaikan harga cabai merah keriting dan bawang merah selama Triwulan II menunjukkan adanya potensi berlanjutnya tekanan harga apabila pasokan dari daerah sentra mengalami gangguan. Kondisi cuaca, penurunan produksi dan keterbatasan pasokan dapat menyebabkan harga kembali meningkat.

2. Risiko gangguan distribusi

Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menyebabkan harga komoditas di Kota Sungai Penuh sensitif terhadap biaya distribusi dan kondisi transportasi. Gangguan jalan, kenaikan biaya angkutan atau keterlambatan pasokan dapat meningkatkan harga di tingkat konsumen.

3. Risiko kenaikan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional

Peningkatan permintaan masyarakat pada periode tertentu dapat meningkatkan tekanan terhadap komoditas pangan strategis, terutama cabai, bawang merah, daging ayam, telur, daging sapi dan ikan.

4. Risiko kenaikan harga daging sapi dan komoditas protein hewani

Kenaikan harga daging sapi selama Triwulan II perlu diantisipasi, terutama jika terjadi peningkatan permintaan atau keterbatasan pasokan dari daerah pemasok.

5. Risiko perubahan harga komoditas pangan dari daerah pemasok

Perubahan harga di daerah pemasok utama dapat dengan cepat mempengaruhi harga di Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu, pemantauan tidak hanya perlu dilakukan pada harga di pasar Kota Sungai Penuh, tetapi juga terhadap kondisi pasokan dan harga di daerah asal komoditas.

6. Risiko cuaca dan produksi hortikultura

Komoditas cabai dan bawang merah sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Curah hujan yang tinggi, gangguan produksi, serangan organisme pengganggu tanaman maupun perubahan pola musim dapat menyebabkan penurunan pasokan dan meningkatkan harga.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

A. Gambaran Umum

Pengendalian inflasi di Kota Sungai Penuh pada Triwulan II Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama yang berkaitan dengan **fluktuasi harga pangan, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, kelancaran distribusi, serta keterbatasan produksi beberapa komoditas pangan strategis**.

Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga bulan April, Mei dan Juni 2026, secara umum sebagian besar komoditas pangan masih berada dalam kondisi relatif terkendali. Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga cukup signifikan, terutama **cabai merah keriting dan bawang merah**, disertai peningkatan pada cabai rawit merah, daging sapi dan ikan tongkol.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan inflasi Kota Sungai Penuh masih sangat dipengaruhi oleh kelompok **volatile food**, sehingga pengendalian harga tidak cukup hanya dilakukan melalui pemantauan harga, tetapi membutuhkan penguatan aspek produksi, pasokan, distribusi dan kerja sama antardaerah.

B. Identifikasi Permasalahan

1. Fluktuasi harga komoditas hortikultura masih tinggi

Permasalahan utama selama Triwulan II Tahun 2026 adalah meningkatnya harga sejumlah komoditas hortikultura.

Harga bawang merah meningkat dari sekitar Rp22.900/kg pada April menjadi sekitar Rp30.000/kg pada Juni 2026 atau meningkat sekitar 31%. Sementara itu, cabai merah keriting meningkat dari sekitar Rp28.800/kg menjadi sekitar Rp42.600/kg atau meningkat sekitar 48%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komoditas hortikultura masih memiliki tingkat volatilitas harga yang cukup tinggi dan berpotensi menjadi sumber tekanan inflasi apabila tidak segera diantisipasi.

2. Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah

Kota Sungai Penuh masih membutuhkan pasokan sejumlah komoditas pangan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketergantungan tersebut menyebabkan harga pangan lokal relatif sensitif terhadap perubahan harga di daerah pemasok.

Apabila terjadi penurunan produksi di daerah sentra, gangguan distribusi atau peningkatan biaya angkutan, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh konsumen di Kota Sungai Penuh.

Kondisi ini menjadi semakin penting karena pengendalian inflasi di daerah pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan permintaan. Dalam HLM TPID Provinsi Jambi Tahun 2026 juga ditekankan pentingnya memperkuat produksi, pemasaran dan sistem peringatan dini untuk mencegah lonjakan harga.

3. Produksi komoditas penyumbang inflasi belum optimal

Ketersediaan produksi lokal untuk beberapa komoditas strategis, khususnya cabai dan bawang merah, belum sepenuhnya mampu menjadi penyangga kebutuhan masyarakat.

Ketika pasokan dari luar daerah berkurang, kemampuan produksi lokal yang terbatas menyebabkan harga lebih cepat mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan produksi komoditas yang memiliki karakteristik **cepat bergejolak dan berulang menjadi penyumbang inflasi**, terutama cabai merah, cabai rawit dan bawang merah.

4. Risiko gangguan distribusi dan biaya transportasi

Letak geografis Kota Sungai Penuh dan karakteristik rantai pasok pangan menyebabkan kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan harga.

Kenaikan biaya transportasi, keterlambatan pasokan, kondisi jalan maupun gangguan distribusi dari daerah pemasok dapat meningkatkan harga di tingkat pedagang dan konsumen.

Permasalahan ini menjadi lebih penting bagi komoditas yang mempunyai masa simpan relatif pendek seperti cabai, bawang, sayuran, ikan dan produk pangan segar lainnya.

5. Fluktuasi harga cabai belum dapat dikendalikan secara berkelanjutan

Cabai merupakan salah satu komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan produksi dan pasokan.

Data Triwulan II menunjukkan adanya peningkatan harga cabai merah keriting yang cukup besar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa intervensi pengendalian harga perlu diarahkan tidak hanya pada saat harga sudah meningkat, tetapi juga melalui **antisipasi produksi dan penyediaan stok sebelum terjadi kelangkaan**.

Dengan demikian, diperlukan sistem peringatan dini berbasis data harga, produksi, stok dan kebutuhan masyarakat.

6. Keterbatasan informasi mengenai stok dan pasokan pangan secara real time

Pemantauan harga telah dilakukan, tetapi pengendalian inflasi akan lebih efektif apabila data harga dilengkapi dengan informasi mengenai:

- jumlah stok;
- volume pasokan yang masuk;
- daerah asal komoditas;
- kebutuhan konsumsi;
- perkembangan produksi;
- harga di daerah pemasok; dan
- biaya distribusi.

Ketersediaan informasi tersebut penting agar TPID dapat mengetahui potensi kenaikan harga **sebelum terjadi lonjakan di tingkat konsumen**.

7. Kerja sama antardaerah dalam pengamanan pasokan perlu diperkuat

Kebutuhan Kota Sungai Penuh terhadap pasokan pangan dari luar daerah menunjukkan pentingnya kerja sama antardaerah.

Kerja sama tidak hanya diperlukan dalam kondisi harga sudah tinggi, tetapi sebaiknya mencakup **perencanaan kebutuhan, pengamanan pasokan, distribusi, dan mekanisme intervensi ketika terjadi gejolak harga**.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Jambi yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, distributor, petani, BUMN dan BUMD untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

8. Kenaikan harga daging sapi dan ikan perlu diantisipasi

Selain komoditas hortikultura, terdapat peningkatan harga pada beberapa komoditas protein hewani.

Harga daging sapi meningkat dari sekitar Rp140.000/kg pada April menjadi sekitar Rp151.000/kg pada Juni. Harga ikan tongkol juga meningkat dari sekitar Rp35.000/kg menjadi sekitar Rp39.800/kg.

Kenaikan tersebut menunjukkan adanya potensi tekanan pada kelompok pangan hewani, khususnya apabila terjadi peningkatan permintaan atau gangguan pasokan.

9. Ketergantungan terhadap kondisi harga di daerah pemasok

Permasalahan inflasi Kota Sungai Penuh tidak sepenuhnya berasal dari faktor lokal. Perubahan harga di daerah pemasok, harga komoditas nasional, biaya energi, transportasi dan kondisi produksi daerah asal dapat mempengaruhi harga di Sungai Penuh.

Dengan demikian, pemantauan TPID perlu diperluas dari sekadar memantau harga pasar lokal menjadi **pemantauan rantai pasok dari daerah produsen sampai konsumen**.

10. Belum optimalnya pengembangan cadangan/stok penyangga komoditas tertentu

Untuk komoditas yang sering mengalami gejolak harga, diperlukan mekanisme pengamanan stok atau pasokan.

Ketersediaan stok penyangga dapat digunakan untuk mengurangi tekanan harga ketika pasokan pasar mengalami gangguan, terutama untuk beras, cabai, bawang merah, minyak goreng dan komoditas pangan strategis lainnya.

11. Intervensi pasar masih bersifat responsif terhadap kenaikan harga

Salah satu tantangan pengendalian inflasi adalah memastikan intervensi dilakukan sebelum harga mencapai tingkat yang terlalu tinggi.

Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, pemantauan pasar dan kegiatan stabilisasi perlu diarahkan berdasarkan indikator peringatan dini sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

Pengalaman pengendalian inflasi di Provinsi Jambi menunjukkan pentingnya pemantauan komoditas strategis dan tindakan TPID dalam menjaga pasokan serta stabilitas harga.

12. Permasalahan data harga masih perlu diperbaiki

Data Panel Harga Pangan Mei 2026 yang menjadi bahan analisis menunjukkan adanya beberapa **ketidaksesuaian formula/posisi kolom**, seperti munculnya nilai `#REF!`, `#DIV/0!` dan beberapa angka yang tidak konsisten dengan jenis komoditas.

Hal ini merupakan permasalahan penting karena data harga merupakan dasar dalam:

- mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi;
- menentukan prioritas intervensi;
- melakukan evaluasi kebijakan;
- menyusun laporan TPID; dan
- menentukan kebutuhan kerja sama pasokan.

Oleh karena itu, diperlukan validasi dan rekonsiliasi data secara berkala antara enumerator, perangkat daerah pengampu data, BPS dan TPID.

C. Permasalahan Utama yang Perlu Menjadi Prioritas

Berdasarkan identifikasi tersebut, terdapat **5 permasalahan utama** yang perlu menjadi prioritas pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh:

No.	Permasalahan Prioritas	Komoditas/Faktor Terkait
1	Fluktuasi harga pangan hortikultura	Cabai merah, cabai rawit, bawang merah
2	Ketergantungan pasokan dari luar daerah	Berbagai pangan strategis
3	Keterbatasan produksi lokal	Cabai, bawang merah dan komoditas pangan lainnya
4	Risiko gangguan distribusi	Transportasi, jarak daerah pemasok, biaya angkutan
5	Belum optimalnya sistem peringatan dini dan kualitas data	Harga, stok, produksi dan pasokan

D. Rumusan Permasalahan untuk Laporan TPID

Secara ringkas, permasalahan pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh Triwulan II Tahun 2026 dapat dirumuskan sebagai berikut:

> **Pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh pada Triwulan II Tahun 2026 masih menghadapi permasalahan berupa tingginya volatilitas harga komoditas pangan strategis, terutama cabai merah keriting dan bawang merah, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, keterbatasan produksi komoditas pangan strategis di daerah, risiko gangguan distribusi dan biaya transportasi, serta belum optimalnya sistem peringatan dini yang mengintegrasikan informasi harga, stok, produksi dan pasokan. Selain itu, kualitas dan konsistensi data harga masih perlu diperkuat sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi. Kondisi tersebut memerlukan penguatan koordinasi TPID, kerja sama antardaerah, peningkatan produksi pangan lokal, pengamanan pasokan, kelancaran distribusi serta pelaksanaan intervensi pasar secara lebih cepat, tepat sasaran dan berbasis data.**

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TRIWULAN II TAHUN 2026

A. Gambaran Umum

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Sungai Penuh pada Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sungai Penuh bersama perangkat daerah terkait, instansi vertikal, BUMN/BUMD, pelaku usaha, distributor dan pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan **4K**, yaitu **keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif**.

Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan perkembangan harga pangan strategis dan kondisi pasokan di daerah. Berdasarkan pemantauan harga selama April–Juni 2026, komoditas yang perlu mendapatkan perhatian antara lain cabai merah keriting, bawang merah, cabai rawit merah, daging sapi dan ikan tongkol.

B. Pelaksanaan Kebijakan Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga masyarakat, TPID Kota Sungai Penuh melaksanakan pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang penting secara berkala melalui kegiatan pemantauan pasar dan Panel Harga Pangan.

Pemantauan dilakukan terhadap komoditas strategis antara lain beras, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu dan ikan.

Hasil pemantauan menjadi bahan bagi TPID untuk mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menentukan langkah intervensi yang diperlukan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, perhatian lebih diarahkan kepada komoditas hortikultura yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Harga cabai merah keriting meningkat dari sekitar Rp28.800/kg pada April menjadi sekitar Rp42.600/kg pada Juni 2026. Harga bawang merah juga meningkat dari sekitar Rp22.900/kg menjadi sekitar Rp30.000/kg.

Terhadap perkembangan tersebut, TPID perlu memastikan agar kenaikan harga tidak berkembang menjadi gejolak harga yang lebih luas melalui pemantauan harga secara intensif, koordinasi dengan pedagang dan distributor, serta penyiapan intervensi pasar apabila diperlukan.

Selain itu, ketersediaan pangan dengan harga terjangkau juga didukung melalui pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan, termasuk Gerakan Pangan Murah dan/atau operasi pasar sesuai kondisi perkembangan harga dan kebutuhan masyarakat.

C. Pelaksanaan Kebijakan Ketersediaan Pasokan

Kebijakan ketersediaan pasokan dilaksanakan melalui koordinasi antara TPID dengan perangkat daerah teknis, pelaku usaha, distributor, Bulog dan daerah pemasok.

Ketersediaan pasokan menjadi salah satu aspek penting mengingat sebagian kebutuhan pangan Kota Sungai Penuh masih dipenuhi dari luar daerah. Ketergantungan terhadap pasokan eksternal menyebabkan perubahan produksi dan harga di daerah pemasok dapat mempengaruhi harga di tingkat konsumen Kota Sungai Penuh.

Oleh karena itu, TPID melakukan pemantauan terhadap kondisi pasokan komoditas strategis, terutama cabai, bawang merah, bawang putih, beras, telur, ayam ras, daging sapi dan ikan.

Untuk komoditas yang berpotensi mengalami gejolak harga, kebijakan diarahkan pada pengamanan pasokan melalui koordinasi dengan daerah produsen dan pemasok serta

mendorong peningkatan produksi pangan lokal.

Pengembangan produksi lokal terutama diarahkan pada komoditas yang mempunyai tingkat volatilitas tinggi dan berpotensi menjadi penyumbang inflasi, seperti cabai merah, cabai rawit dan bawang merah.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pasokan pangan secara berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

D. Pelaksanaan Kebijakan Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di Kota Sungai Penuh. Struktur geografis dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menyebabkan biaya dan waktu distribusi mempunyai pengaruh terhadap pembentukan harga di tingkat konsumen.

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi, TPID melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pelaku distribusi untuk memastikan pasokan komoditas pangan strategis dapat masuk ke pasar Kota Sungai Penuh secara lancar.

Pemantauan juga diarahkan terhadap potensi hambatan distribusi yang dapat menyebabkan keterlambatan pasokan atau peningkatan biaya angkutan.

Kebijakan distribusi juga dilakukan melalui penguatan kerja sama antardaerah, khususnya dengan daerah yang menjadi sumber pasokan komoditas pangan strategis. Kerja sama tersebut penting untuk memastikan kontinuitas pasokan, terutama ketika terjadi penurunan produksi atau kenaikan permintaan.

Untuk komoditas yang mempunyai masa simpan relatif pendek seperti cabai, bawang, sayuran dan ikan, kelancaran distribusi menjadi semakin penting karena keterlambatan pasokan dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga dalam waktu relatif singkat.

E. Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif dilakukan untuk memastikan informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan pasokan dan kebijakan pengendalian inflasi dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota TPID dan masyarakat.

TPID Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi dan pertukaran informasi antarperangkat daerah serta instansi terkait mengenai perkembangan harga komoditas pangan strategis.

Informasi hasil pemantauan harga digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi dan pengambilan keputusan, khususnya untuk menentukan komoditas yang membutuhkan perhatian dan intervensi.

Komunikasi kepada masyarakat juga penting untuk menjaga ekspektasi inflasi dan mencegah perilaku pembelian secara berlebihan ketika terjadi kenaikan harga pada komoditas tertentu.

Penyampaian informasi harga pangan secara berkala juga dapat meningkatkan transparansi harga dan memberikan referensi bagi masyarakat dalam melakukan pembelian kebutuhan

pokok.

F. Penguatan Pemantauan Harga dan Sistem Peringatan Dini

Salah satu kebijakan penting yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah penguatan pemantauan harga pangan.

Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan harga dan mendeteksi komoditas yang mulai menunjukkan kecenderungan kenaikan.

Data harga April–Juni 2026 menunjukkan bahwa komoditas cabai merah keriting dan bawang merah mengalami peningkatan cukup signifikan. Perkembangan tersebut menjadi indikator bahwa komoditas volatile food perlu mendapatkan pemantauan lebih intensif.

Ke depan, pemantauan perlu dikembangkan menjadi sistem peringatan dini yang tidak hanya melihat harga, tetapi juga mencakup:

- perkembangan stok;
- volume pasokan;
- produksi komoditas;
- harga di daerah pemasok;
- kebutuhan konsumsi;
- kondisi cuaca;
- biaya transportasi; dan
- perkembangan permintaan masyarakat.

Dengan demikian, TPID dapat melakukan tindakan antisipatif sebelum terjadi lonjakan harga yang lebih besar.

G. Penguatan Koordinasi TPID

Pelaksanaan pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi TPID dengan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait.

Koordinasi diperlukan untuk memastikan setiap perkembangan harga yang berpotensi menimbulkan tekanan inflasi dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Perangkat daerah yang mempunyai peran penting antara lain perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, perhubungan, komunikasi dan informasi serta perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.

Koordinasi juga dilakukan dengan BPS, Bank Indonesia, Bulog, Satgas Pangan, distributor dan pelaku usaha untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan harga, pasokan dan distribusi.

H. Pelaksanaan Pengendalian pada Komoditas Prioritas

Berdasarkan perkembangan harga Triwulan II Tahun 2026, beberapa komoditas menjadi perhatian utama TPID.

1. Cabai merah dan cabai rawit

Pengendalian diarahkan melalui pemantauan harga dan pasokan secara lebih intensif, penguatan produksi lokal serta koordinasi dengan daerah pemasok.

2. Bawang merah

Kenaikan harga bawang merah perlu diantisipasi melalui pengamanan pasokan, pemantauan stok dan koordinasi dengan daerah produsen.

3. Daging sapi

Kenaikan harga daging sapi perlu diantisipasi melalui pemantauan ketersediaan ternak, pasokan daging dan perkembangan permintaan masyarakat.

4. Ikan

Peningkatan harga ikan tongkol perlu menjadi perhatian dengan memastikan kelancaran pasokan dari daerah pemasok serta memantau biaya distribusi.

5. Beras

Harga beras yang relatif stabil perlu dipertahankan melalui pengamanan stok dan koordinasi dengan Bulog serta pelaku distribusi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

A. Gambaran Umum

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh Triwulan II Tahun 2026 dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menjaga daya beli masyarakat.

Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang penting selama April, Mei dan Juni 2026, pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi oleh perangkat daerah dan TPID, serta perkembangan kondisi pasokan dan distribusi pangan.

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan dan memberikan hasil positif terhadap stabilitas sebagian besar komoditas pangan. Namun demikian, masih terdapat tekanan harga pada beberapa komoditas volatile food, terutama cabai merah keriting dan bawang merah, sehingga efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan pada aspek pengamanan pasokan dan pengendalian harga komoditas hortikultura.

B. Evaluasi Berdasarkan Aspek 4K

1. Keterjangkauan Harga

Dari aspek keterjangkauan harga, kebijakan pengendalian inflasi secara umum telah berjalan cukup baik. Pemantauan harga dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan harga komoditas pangan strategis dan mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan.

Beberapa komoditas menunjukkan perkembangan harga yang relatif stabil atau bahkan menurun. Harga daging ayam ras mengalami penurunan dari sekitar Rp43.200/kg pada April menjadi sekitar Rp40.000/kg pada Juni. Harga telur ayam ras juga mengalami penurunan dari sekitar Rp27.000/kg menjadi sekitar Rp24.000/kg. Bawang putih juga menunjukkan kecenderungan penurunan.

Namun, keterjangkauan harga masih menghadapi tekanan pada komoditas tertentu. Harga cabai merah keriting meningkat dari sekitar Rp28.800/kg pada April menjadi sekitar Rp42.600/kg pada Juni atau meningkat sekitar 48%. Harga bawang merah juga meningkat dari sekitar Rp22.900/kg menjadi sekitar Rp30.000/kg atau sekitar 31%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan keterjangkauan harga telah mampu menjaga sebagian besar komoditas dalam kondisi relatif terkendali, tetapi belum sepenuhnya mampu meredam gejolak harga komoditas hortikultura.

Hasil evaluasi:
Kebijakan keterjangkauan harga dinilai **cukup efektif**, namun perlu ditingkatkan pada komoditas volatile food yang mengalami kenaikan harga secara signifikan.

2. Ketersediaan Pasokan

Dari aspek ketersediaan pasokan, secara umum kebutuhan pangan masyarakat masih dapat dipenuhi dan tidak terjadi kelangkaan secara luas terhadap komoditas pangan strategis.

Stabilnya harga beras, kedelai, tepung terigu dan beberapa komoditas pangan lainnya menunjukkan bahwa pasokan komoditas tersebut relatif tersedia.

Namun, kenaikan harga cabai merah, bawang merah dan beberapa komoditas lainnya mengindikasikan bahwa pasokan belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan permintaan dan perubahan kondisi produksi.

Kondisi ini juga berkaitan dengan ketergantungan Kota Sungai Penuh terhadap pasokan dari luar daerah. Ketika terjadi gangguan produksi di daerah pemasok, penurunan pasokan atau peningkatan biaya distribusi, harga di Kota Sungai Penuh dapat meningkat dengan cepat.

Hasil evaluasi:
Kebijakan ketersediaan pasokan dinilai **cukup efektif**, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan produksi lokal dan pengamanan pasokan dari daerah pemasok.

3. Kelancaran Distribusi

Dari aspek distribusi, secara umum pasokan pangan masih dapat masuk ke pasar Kota Sungai Penuh sehingga tidak terjadi gangguan pasokan yang bersifat luas.

Namun, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menyebabkan biaya dan kelancaran distribusi tetap menjadi faktor risiko terhadap stabilitas harga.

Komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah sangat sensitif terhadap gangguan distribusi karena mempunyai karakteristik mudah rusak dan perubahan harga yang cepat.

Oleh karena itu, efektivitas kebijakan distribusi perlu ditingkatkan melalui pemantauan rantai pasok, koordinasi dengan daerah pemasok dan penguatan kerja sama antardaerah.

Hasil evaluasi:
Kebijakan kelancaran distribusi dinilai **cukup efektif**, namun masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam memastikan kontinuitas pasokan komoditas hortikultura.

4. Komunikasi Efektif

Dari aspek komunikasi, koordinasi antaranggota TPID dan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengendalian inflasi.

Informasi perkembangan harga digunakan sebagai bahan pemantauan dan pengambilan kebijakan. Namun, sistem informasi pengendalian inflasi masih perlu diperkuat agar informasi harga, stok, produksi dan distribusi dapat terintegrasi secara lebih baik.

Selain itu, komunikasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi harga dan pasokan pangan.

Hasil evaluasi:
Kebijakan komunikasi efektif dinilai **cukup baik**, tetapi perlu penguatan integrasi data dan sistem peringatan dini.

C. Evaluasi Berdasarkan Komoditas

1. Beras

Harga beras selama Triwulan II 2026 relatif stabil. Beras SPHP berada pada kisaran Rp13.000–Rp13.100/kg, sedangkan beberapa jenis beras lainnya relatif tidak mengalami perubahan berarti.

Evaluasi: kebijakan pengamanan pasokan beras berjalan **efektif** dan perlu dipertahankan.

2. Cabai Merah Keriting

Cabai merah keriting menjadi salah satu komoditas yang paling perlu mendapatkan perhatian. Harga meningkat dari sekitar Rp28.800/kg pada April menjadi sekitar Rp42.600/kg pada Juni.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga cabai masih menghadapi kendala dari sisi produksi, pasokan dan distribusi.

Evaluasi: kebijakan pengendalian cabai dinilai **belum optimal** dan membutuhkan pendekatan dari sisi hulu, terutama peningkatan produksi lokal dan pengamanan pasokan.

3. Bawang Merah

Harga bawang merah meningkat dari sekitar Rp22.900/kg pada April menjadi sekitar Rp30.000/kg pada Juni.

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dan kontinuitas pasokan masih perlu diperkuat.

Evaluasi: kebijakan pengendalian bawang merah dinilai **belum optimal** dan perlu diperkuat melalui kerja sama pasokan dan pengembangan produksi lokal.

4. Daging Sapi

Harga daging sapi menunjukkan kecenderungan meningkat dari sekitar Rp140.000/kg menjadi sekitar Rp151.000/kg.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pemantauan pasokan dan perkembangan permintaan.

Evaluasi: pengendalian harga daging sapi dinilai **cukup**, tetapi perlu penguatan pengamanan pasokan.

5. Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

Daging ayam ras dan telur ayam ras menunjukkan penurunan harga selama periode April–Juni.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan relatif memadai dan mekanisme pasar berjalan cukup baik.

Evaluasi: kebijakan pengendalian pada komoditas ayam dan telur dinilai **efektif**.

6. Ikan Tongkol

Harga ikan tongkol meningkat dari sekitar Rp35.000/kg pada April menjadi sekitar Rp39.800/kg pada Juni.

Kenaikan tersebut perlu dikaitkan dengan kondisi pasokan dan biaya distribusi.

Evaluasi: pengendalian komoditas ikan dinilai **cukup**, namun perlu penguatan koordinasi pasokan.

D. Evaluasi terhadap Sistem Pemantauan Harga

Pemantauan harga melalui Panel Harga Pangan telah memberikan informasi penting mengenai perkembangan harga komoditas di tingkat konsumen.

Namun, hasil evaluasi terhadap data Mei 2026 menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan teknis berupa ketidaksesuaian formula dan posisi data, seperti munculnya `#REF!` dan `#DIV/0!`, serta beberapa angka yang perlu diverifikasi kembali berdasarkan jenis komoditas.

Kondisi tersebut perlu diperbaiki karena kualitas data sangat menentukan ketepatan analisis dan kebijakan pengendalian inflasi.

Ke depan, diperlukan:

1. validasi data sebelum digunakan dalam laporan;
2. pengecekan formula dan posisi kolom;

rekonsiliasi data antarperangkat daerah;

3.
4. pembandingan harga antarperiode;
5. verifikasi terhadap harga pasar aktual; dan
6. penyusunan database harga yang lebih terintegrasi.

Evaluasi: sistem pemantauan harga sudah berjalan, tetapi kualitas dan validitas data masih perlu **diperkuat**.

E. Evaluasi Koordinasi TPID

Koordinasi TPID merupakan instrumen penting dalam pengendalian inflasi daerah. Selama Triwulan II Tahun 2026, koordinasi antarperangkat daerah dan instansi terkait tetap diperlukan dalam merespons perkembangan harga dan pasokan.

Namun, koordinasi perlu lebih diarahkan pada tindakan yang bersifat **antisipatif**, bukan hanya merespons ketika harga telah mengalami kenaikan.

Ke depan, setiap hasil pemantauan harga perlu diikuti dengan:

- identifikasi penyebab kenaikan;
- identifikasi daerah asal komoditas;
- pemantauan stok;
- perkiraan kebutuhan;
- penentuan langkah intervensi; dan
- penetapan perangkat daerah penanggung jawab tindak lanjut.

Dengan demikian, koordinasi TPID dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan terukur.

Evaluasi: koordinasi TPID dinilai **cukup baik**, tetapi perlu diperkuat dari sisi tindak lanjut dan pengambilan keputusan berbasis data.

F. Evaluasi Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas kebijakan pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh Triwulan II Tahun 2026 dapat dirangkum sebagai berikut:

Aspek	Hasil Evaluasi	Keterangan
Keterjangkauan harga	Cukup efektif	Sebagian besar harga terkendali, tetapi cabai dan bawang meningkat
Ketersediaan pasokan	Cukup efektif	Pasokan tersedia, tetapi masih bergantung pada daerah luar
Kelancaran distribusi	Cukup efektif	Tidak terdapat gangguan luas, tetapi risiko distribusi masih tinggi
Komunikasi efektif	Cukup baik	Koordinasi berjalan, integrasi informasi perlu diperkuat
Pemantauan harga	Cukup baik	Sudah berjalan, tetapi kualitas data perlu diperbaiki
Pengendalian volatile food	Belum optimal	Cabai dan bawang merah masih mengalami kenaikan signifikan
Kerja sama antardaerah	Perlu diperkuat	Penting untuk menjamin kontinuitas pasokan

Produksi pangan lokal	Perlu ditingkatkan	Terutama cabai dan bawang merah

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TRIWULAN II TAHUN 2026

A. Gambaran Umum

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh pada Triwulan II Tahun 2026, secara umum stabilitas harga pangan masih relatif terjaga. Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, terutama **cabai merah keriting dan bawang merah**, serta kenaikan pada beberapa komoditas lainnya seperti daging sapi dan ikan tongkol.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh perlu diarahkan tidak hanya pada pengendalian harga ketika terjadi kenaikan, tetapi juga pada upaya **preventif dan antisipatif**, terutama melalui pengamanan pasokan, peningkatan produksi lokal, penguatan kerja sama antardaerah, kelancaran distribusi dan perbaikan sistem informasi harga.

Rekomendasi kebijakan berikut disusun dengan mengacu pada pendekatan **4K**, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

B. Rekomendasi Kebijakan Keterjangkauan Harga

1. Meningkatkan pemantauan harga komoditas pangan strategis

TPID Kota Sungai Penuh perlu meningkatkan intensitas pemantauan harga, terutama terhadap komoditas yang menunjukkan volatilitas tinggi, yaitu:

- cabai merah keriting;
- cabai rawit merah;
- bawang merah;
- bawang putih;
- daging sapi;
- daging ayam ras;
- telur ayam ras;
- ikan;
- beras;
- gula pasir; dan
- minyak goreng.

Pemantauan sebaiknya dilakukan secara rutin dan hasilnya menjadi dasar penentuan langkah intervensi.

2. Menetapkan komoditas prioritas pengendalian

Berdasarkan perkembangan harga Triwulan II Tahun 2026, **cabai merah keriting dan bawang merah** perlu ditetapkan sebagai komoditas prioritas pengendalian.

Harga cabai merah keriting meningkat sekitar 48% dari April ke Juni, sedangkan bawang merah meningkat sekitar 31%. Oleh karena itu, kedua komoditas tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan produksi, pengamanan pasokan dan intervensi pasar.

3. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah secara tepat sasaran

Gerakan Pangan Murah dapat dilaksanakan apabila terjadi kenaikan harga yang berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.

Pelaksanaannya perlu didasarkan pada hasil pemantauan harga sehingga intervensi dapat dilakukan pada waktu dan komoditas yang tepat, bukan hanya bersifat seremonial.

C. Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pasokan

1. Meningkatkan produksi cabai dan bawang merah lokal

Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu meningkatkan produksi komoditas yang sering mengalami gejolak harga, khususnya cabai merah, cabai rawit dan bawang merah.

Pengembangan produksi dapat dilakukan melalui:

- pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia;
- pengembangan kawasan produksi cabai;
- bantuan sarana produksi;
- penyediaan bibit unggul;
- pendampingan petani;
- pengendalian organisme pengganggu tanaman; dan
- pengaturan pola tanam.

Tujuannya adalah membangun **buffer supply lokal** sehingga ketika pasokan dari luar daerah berkurang, sebagian kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi dari produksi daerah.

2. Menyusun kalender produksi komoditas penyumbang inflasi

Dinas teknis bersama TPID perlu menyusun kalender produksi cabai dan bawang merah untuk mengetahui periode surplus dan periode potensi kekurangan pasokan.

Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan waktu tanam, waktu panen, kebutuhan pasokan dari luar daerah dan waktu pelaksanaan intervensi.

3. Mendorong diversifikasi sumber pasokan

Kota Sungai Penuh perlu menghindari ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu daerah pemasok.

Untuk komoditas strategis, perlu disiapkan beberapa alternatif sumber pasokan sehingga apabila terjadi gangguan produksi atau distribusi di satu daerah, pasokan dapat dialihkan dari daerah lain.

4. Menyusun pemetaan kebutuhan dan pasokan pangan

TPID bersama perangkat daerah terkait perlu menyusun pemetaan sederhana mengenai:

kebutuhan Kota Sungai Penuh → produksi lokal → kekurangan pasokan → daerah pemasok → volume pasokan → waktu pengiriman.

Pemetaan tersebut akan membantu pemerintah mengetahui komoditas mana yang perlu diamankan terlebih dahulu.

D. Rekomendasi Kebijakan Kelancaran Distribusi

1. Memperkuat kerja sama antardaerah

Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu memperkuat kerja sama dengan daerah pemasok pangan strategis.

Kerja sama sebaiknya tidak hanya berupa pembelian komoditas pada saat harga meningkat, tetapi mencakup:

- kesepakatan pasokan;
- volume kebutuhan;
- jadwal pengiriman;
- mekanisme distribusi;
- harga yang wajar;
- kontak distributor/pelaku usaha; dan
- mekanisme koordinasi ketika terjadi gangguan pasokan.

2. Memetakan jalur distribusi komoditas strategis

TPID perlu mengetahui jalur distribusi komoditas utama dari daerah produsen sampai ke Kota Sungai Penuh.

Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui titik yang berpotensi menyebabkan peningkatan biaya distribusi dan harga.

3. Menjaga kelancaran distribusi pangan segar

Komoditas seperti cabai, bawang, sayuran dan ikan membutuhkan distribusi yang cepat karena memiliki risiko kerusakan yang relatif tinggi.

Oleh karena itu, koordinasi dengan pelaku distribusi perlu diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan pasokan yang dapat menyebabkan kelangkaan sementara dan kenaikan harga.

E. Rekomendasi Sistem Peringatan Dini Inflasi

1. Membentuk sistem Early Warning System (EWS) harga pangan

TPID Kota Sungai Penuh perlu mengembangkan sistem peringatan dini sederhana berbasis data harga dan pasokan.

Sebagai contoh:

- **Status Normal:** harga relatif stabil;
- **Status Waspada:** harga meningkat secara berturut-turut;
- **Status Siaga:** harga meningkat cukup tinggi dan stok mulai berkurang;
- **Status Intervensi:** diperlukan tindakan stabilisasi harga/pasokan.

Sistem tersebut akan membantu TPID mengambil tindakan **sebelum terjadi lonjakan harga**.

2. Mengintegrasikan data harga, stok dan pasokan

Sistem peringatan dini tidak cukup hanya menggunakan data harga.

Data yang perlu dipantau meliputi:

- harga pasar;
- stok pedagang;
- volume pasokan;
- harga di daerah pemasok;
- produksi lokal;
- kondisi cuaca;
- biaya transportasi; dan
- perkembangan permintaan masyarakat.

F. Rekomendasi Perbaikan Data Harga

1. Melakukan validasi data Panel Harga Pangan

Data Panel Harga Pangan perlu diperiksa dan divalidasi secara berkala sebelum digunakan dalam laporan TPID.

Hal ini penting karena data Mei 2026 yang digunakan dalam evaluasi masih terdapat beberapa permasalahan teknis seperti `#REF!`, `#DIV/0!` dan ketidaksesuaian posisi beberapa angka.

2. Membuat standar validasi data

Setiap data harga yang masuk perlu diperiksa minimal berdasarkan:

1. jenis komoditas;
2. satuan;
3. harga hari sebelumnya;
4. harga hari berjalan;
5. perubahan harga;
6. sumber data; dan
7. kewajaran harga.

Apabila terjadi perubahan harga yang sangat besar, perlu dilakukan verifikasi ulang kepada enumerator atau pedagang.

3. Membuat dashboard harga TPID

TPID dapat mengembangkan dashboard sederhana yang menampilkan:

- harga harian;
- rata-rata mingguan;
- perubahan bulanan;
- komoditas dengan kenaikan tertinggi;
- komoditas dengan penurunan tertinggi;
- stok;
- daerah asal pasokan; dan
- status risiko inflasi.

Dashboard tersebut akan memudahkan pimpinan daerah dalam melihat kondisi inflasi secara cepat.

G. Rekomendasi Penguatan Kerja Sama Antardaerah

Kerja sama antardaerah perlu menjadi salah satu prioritas kebijakan karena Kota Sungai Penuh masih membutuhkan pasokan pangan dari daerah lain.

Kerja sama dapat diarahkan pada komoditas:

- cabai;
- bawang merah;
- bawang putih;
- ayam ras;
- telur ayam ras;
- daging sapi;
- ikan; dan
- komoditas pangan strategis lainnya.

Kerja sama tersebut sebaiknya bersifat **jangka menengah dan berkelanjutan**, bukan hanya dilakukan ketika terjadi gejolak harga.

H. Rekomendasi Penguatan Produksi Pangan Lokal

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu memperkuat produksi pangan lokal.

Prioritas dapat diarahkan pada komoditas yang:

1. sering mengalami kenaikan harga;
2. memiliki permintaan tinggi;
3. mudah diproduksi secara lokal;
4. memiliki masa panen relatif pendek; dan
5. mempunyai potensi dikembangkan oleh kelompok tani.

Khusus cabai dan bawang merah, perlu disusun program produksi yang terintegrasi mulai dari **penyediaan bibit → budidaya → panen → penyimpanan → pemasaran**.

I. Rekomendasi Intervensi Pasar

Intervensi pasar perlu dilakukan secara selektif apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar.

Bentuk intervensi dapat berupa:

1. Gerakan Pangan Murah;
2. operasi pasar;
3. fasilitasi distribusi;
4. penyaluran beras SPHP sesuai ketentuan;
5. kerja sama dengan distributor;
6. pemanfaatan stok yang tersedia; dan
7. koordinasi dengan daerah pemasok.

Intervensi harus didasarkan pada hasil pemantauan sehingga tepat komoditas, tepat waktu dan tepat sasaran.

J. Rekomendasi Penguatan Peran TPID

TPID Kota Sungai Penuh perlu memperkuat koordinasi dan pembagian tugas antaranggota.

Setiap hasil pemantauan harga sebaiknya menghasilkan **tindak lanjut yang jelas**, yaitu:

Permasalahan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
Harga cabai meningkat	Pengamanan pasokan dan produksi lokal	Perangkat daerah pangan/pertanian + TPID
Harga bawang merah meningkat	Kerja sama pasokan dan pengembangan produksi	Perangkat daerah terkait
Pasokan luar daerah terganggu	Mencari sumber pasokan alternatif	TPID + distributor
Biaya distribusi meningkat	Koordinasi distribusi	Perangkat daerah terkait
Harga pangan bergejolak	Gerakan Pangan Murah/intervensi	TPID
Data harga tidak konsisten	Validasi dan rekonsiliasi data	Enumerator + perangkat daerah + BPS
Risiko kenaikan harga	Aktivasi EWS	Sekretariat TPID

K. Rekomendasi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang

1. Jangka Pendek

Prioritas dalam waktu dekat adalah:

- meningkatkan pemantauan harga harian;
- memantau stok cabai dan bawang merah;
- mengamankan pasokan dari daerah pemasok;
- melakukan koordinasi dengan distributor;
- melaksanakan Gerakan Pangan Murah apabila diperlukan;
- memperbaiki data Panel Harga Pangan; dan
- mengaktifkan mekanisme peringatan dini.

2. Jangka Menengah

Kebijakan diarahkan pada:

- pengembangan produksi cabai dan bawang merah;
- penguatan kerja sama antardaerah;
- pemetaan kebutuhan dan pasokan;
- pengembangan database harga pangan;
- peningkatan kapasitas kelompok tani; dan
- penguatan jaringan distribusi pangan.

3. Jangka Panjang

Kebijakan diarahkan pada:

- peningkatan kemandirian pangan daerah;
- pengembangan sentra produksi komoditas strategis;
- pembangunan sistem rantai pasok pangan yang lebih efisien;
- penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha;
- pengembangan kerja sama pangan antardaerah secara berkelanjutan; dan
- pembangunan sistem pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi.

L. Prioritas Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2026, terdapat **7 rekomendasi prioritas** yang perlu menjadi perhatian TPID Kota Sungai Penuh:

Prioritas	Rekomendasi	Tujuan
1	Pengendalian cabai merah dan bawang merah	Mengurangi gejolak volatile food
2	Pengamanan pasokan dari daerah pemasok	Menjamin ketersediaan pangan
3	Peningkatan produksi cabai dan bawang merah lokal	Mengurangi ketergantungan luar daerah
4	Penguatan kerja sama antardaerah	Menjamin kontinuitas pasokan
5	Pengembangan Early Warning System	Mendeteksi risiko inflasi lebih awal
6	Perbaikan dan integrasi data harga	Meningkatkan ketepatan kebijakan
7	Intervensi pasar yang cepat dan tepat sasaran	Menjaga keterjangkauan harga

M. Kesimpulan dan Rekomendasi Utama

Berdasarkan perkembangan harga dan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2026, pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh perlu diarahkan pada **penguatan sisi pasokan dan pencegahan gejolak harga**, bukan hanya pada tindakan setelah harga mengalami kenaikan.

Rekomendasi utama yang perlu dilaksanakan adalah **memperkuat produksi lokal cabai dan bawang merah, menjamin pasokan melalui kerja sama antardaerah, memperlancar distribusi pangan, meningkatkan pemantauan harga dan stok, memperbaiki kualitas data, serta membangun sistem peringatan dini inflasi**.

Khusus untuk cabai merah keriting dan bawang merah, perlu disusun langkah pengendalian yang lebih terukur karena kedua komoditas tersebut menunjukkan kenaikan harga paling signifikan selama Triwulan II Tahun 2026.

Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh pada periode berikutnya diharapkan semakin **responsif, preventif, berbasis data dan berorientasi pada pengamanan pasokan**, sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga.